



## Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi

Ikmal Kholis✉, Khasan Setiaji

DOI: 10.15294/eeaj.v9i2.39543

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Sejarah Artikel

Diterima: 15 Desember 2019  
Disetujui: 7 Februari 2020  
Dipublikasikan: 30 Juni 2020

### Keywords

*Effectiveness; fertilizer subsidy policy; rice plant*

### Abstrak

Kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dengan memberikan subsidi input melalui penetapan HET pupuk subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kabupaten Batang menggunakan enam indikator ketepatan subsidi pupuk. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi di Kabupaten Batang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Cluster Sampling* dengan metode *Two-Stage Cluster Sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan dalam dua tahap. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif untuk mengukur efektivitas kebijakan subsidi pupuk dengan menggunakan enam indikator ketepatan pupuk subsidi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kabupaten Batang berdasarkan enam indikator tepat masih dikategorikan tidak efektif. Hal ini dikarenakan dari segi indikator tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, serta tepat mutu belum terpenuhi. Sedangkan dari indikator tepat jenis dan tepat waktu sudah terpenuhi. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu: Pemerintah terkait harus memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi pupuk serta meningkatkan pengawasan pada proses penyaluran pupuk subsidi kepada petani agar indikator-indikator efektivitas kebijakan subsidi pupuk terpenuhi sehingga proses produksi padi dapat maksimal. Perbaikan dan pengawasan terutama pada indikator harga, jumlah, tempat, serta mutu pupuk subsidi.

### Abstract

*The fertilizer subsidy policy aims to support the agricultural sector by providing input subsidies through the determination of subsidized fertilizer HET. This study aims to analyze the effectiveness of fertilizer subsidy policies in rice farmers in Batang using six indicators of the accuracy of fertilizer subsidies. In this study, the researcher used a descriptive research design. The population of this study were rice farmers in Batang Regency. The sampling technique used cluster sampling with the Two-Stage Cluster Sampling method in which the sampling is done in two stages. The analysis method used is a quantitative descriptive analysis method to measure the effectiveness of the fertilizer subsidy policy by using six indicators of the accuracy of fertilizer subsidies. The results of this study indicate that the policy of fertilizer subsidies to rice farmers in Batang Regency based on six appropriate indicators is still considered ineffective. This is because in terms of indicators of the right price, the right amount, the right place and the right quality has not been met. While the indicators of the right type and on time have been fulfilled. Suggestions related to the results of this study are: The related government should improve the mechanism of fertilizer subsidy distribution and improve supervision on the process of distributing fertilizer subsidies to farmers so that the effectiveness indicators of fertilizer subsidy policies are met so that the rice production process can be maximized. The Improvement and supervision mainly concerned on indicators of price, quantity, location and quality of subsidized fertilizers.*

### How to Cite

Kholis, I & Setiaji, K. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi. *Economic Education Analysis Journal*, 9(2), 503-515.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional. Pada tahun 2016, sektor pertanian mempunyai kontribusi sebesar 13,45% terhadap PDB Indonesia dan merupakan sektor terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan (Badan Pusat Statistik, 2016). Sebagai negara agraris, Indonesia menempatkan pertanian sebagai sektor utama dalam perekonomian, sehingga terdapat berbagai kebijakan pemerintah guna mendukung produksi sektor pertanian. Tujuan umum dalam kebijakan pertanian Indonesia adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produk dan efisiensi produksi naik, serta akibatnya tingkat penghidupan petani yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih sempurna (Rochaeni, 2014). Sektor pertanian harus mendapatkan prioritas karena pertanian juga memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan. Berbagai langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pangan seperti subsidi *input* produksi, kebijakan harga, dan pembenahan kelembagaan pangan. Salah satu kebijakan-kebijakan subsidi input produksi tersebut adalah kebijakan subsidi pupuk.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, Pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain melalui subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan pada petani. Subsidi pupuk merupakan salah satu upaya pemerintah agar petani dapat mengakses kebutuhan pupuk untuk usaha taninya dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian guna tercapainya ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Pada Gambar 1. terlihat bahwa alokasi subsidi pupuk setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2017. Namun, pada tahun 2016 alokasi subsidi pupuk men-

galami penurunan dari sebesar 35,7 (triliun rupiah) pada tahun 2015, menjadi 30,1 (triliun rupiah) pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya pemangkasan anggaran belanja negara pada tahun 2016, kemudian anggaran negara yang digunakan untuk subsidi pupuk juga terlalu besar dan juga adanya indikasi ketidakefektivitasan penggunaan subsidi pupuk ini untuk mendukung sektor pertanian. Namun menurut Darwis dan Supriyati (2013) subsidi yang diberikan dinilai masih kurang tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pemberian subsidi melalui produsen (tidak langsung) telah dikritisi oleh banyak kalangan karena dianggap hanya menguntungkan pihak produsen, bukan kepada petani sebagai kelompok sasarannya.



**Gambar 1.** Alokasi Subsidi Pupuk Indonesia Tahun 2005-2017

Sumber : Kementerian Keuangan, 2017

Kebijakan subsidi pupuk dinilai berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pendapatan petani, khususnya tanaman pangan (Susila, 2010). Kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dengan memberikan subsidi input melalui penetapan HET pupuk subsidi. Kebijakan pupuk bersubsidi terbukti mampu meningkatkan luas areal panen dan produksi padi nasional (Hermawan, 2014); Santoso, 2015). Namun dari manfaat subsidi pupuk bagi pertanian pemerintah harus mengeluarkan biaya anggaran yang tidak sedikit untuk program subsidi.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor per-

tanian menyatakan bahwa pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan prinsip enam tepat dilaksanakan berdasarkan enam indikator tepat yaitu tepat harga, jenis, jumlah, mutu, tempat, dan waktu.

Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa luas penggunaan lahan untuk sawah di Kabupaten Batang selalu mengalami penurunan dari tahun ketahun, dari sebesar 22.479,12 hektare luas area sawah pada tahun 2010 turun menjadi 22.373,68 hektare sawah pada tahun 2016, berkurang 105,44 hektar sawah dalam kurun waktu enam tahun.

Dengan menurunnya luas area penggunaan lahan di Kabupaten Batang untuk persawahan seharusnya hal tersebut juga akan menurunkan kebutuhan pupuk subsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Batang. Namun demikian dari data yang diperoleh seperti tergambar pada Tabel 2. alokasi pupuk subsidi Kabupaten Batang untuk sektor perta-

nian selalu meningkat dari tahun 2013 sampai 2016. Padahal penentuan jumlah alokasi pupuk subsidi didasarkan oleh kebutuhan petani pada luas lahan yang ada.

Dari data observasi awal di Kabupaten Batang dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi masih ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan enam indikator tepat. Masalah yang sering ditemui adalah adalah harga pupuk subsidi yang tidak sesuai HET, serta tempat atau lokasi pengecer resmi yang masih jauh dari lokasi petani. Selain itu dari hasil observasi pada beberapa pengecer mereka menyatakan masih menemui kendala keterlambatan pasokan pupuk subsidi. Maka dari masalah-masalah tersebut dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kabupaten Batang menggunakan enam indikator tepat.

**Tabel 1.** Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Batang (Hektar)

Tahun	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	Jumlah
2010	22.479,12	56.385,04	78.864,16
2011	22.462,41	56.401,75	78.864,16
2012	22.433,13	56.431,03	78.864,16
2013	22.432,13	56.432,03	78.864,16
2014	22.405,33	56.458,83	78.864,16
2015	22.397,14	56.467,02	78.864,16
2016	22.373,68	56.490,48	78.864,16

Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2017

**Tabel 2.** Alokasi Subsidi Pupuk Kabupaten Batang Sektor Pertanian

Tahun	Urea	ZA	SP 36	NPK	Organik	Jumlah (ton)
2013	16000	1750	3100	6400	5000	32250
2014	12948	1321	2584	5214	3833	25900
2015	15100	1750	2700	6300	3900	29750
2016	16450	2820	2735	7280	3965	33250

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Batang, 2017

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu petani padi pada Gapoktan yang ada di Kabupaten Batang. Berdasarkan data dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang diketahui bahwa jumlah petani padi di Kabupaten Batang tahun 2018 sejumlah 57.385 petani.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel menggunakan teknik Cluster Sampling dengan metode *Two-Stage Cluster Sampling* yang dimana pengambilan sampel dilakukan secara dua tahap, yaitu tahap pertama, memilih beberapa kluster dalam populasi sebagai sampel dan tahap kedua memilih elemen dari tiap kluster terpilih. Pada tahap pertama dipilih populasi berdasarkan jumlah luas lahan sawah yang ada di setiap kecamatan. dipilih dua kecamatan

tan dengan luas lahan sawah terluas dan luas lahan sawah terkecil. pada tahap kedua dari dua kecamatan yang dipilih berdasarkan luas lahan terbesar dan terkecil ditentukan jumlah responden menggunakan *Proportionate random sampling*.

Banyaknya sampel yang diambil dihitung menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{7185}{1 + 7185(0,1)^2}$$

$$n = 98,62 \text{ atau dibulatkan menjadi } 99$$

Keterangan:

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

$e^2$  = Toleransi Kesalahan (10%)

**Tabel 3.** Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Batang dan Jumlah Petani Kabupaten Batang Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (ha)	Jumlah Petani
1	<b>Bandar</b>	<b>2412.74</b>	<b>5047</b>
2	Gringsing	1919.6	4744
3	Tersono	1906.31	5565
4	Limpung	1874.05	4854
5	Wonotunggal	1720.85	2689
6	Bawang	1691.22	5910
7	Kandeman	1591.11	2574
8	Reban	1461.1	5540
9	Batang	1379.26	1810
10	Tulis	1329.4	1989
11	Subah	1168.38	5180
12	Blado	1139.3	4523
13	Warungasem	1127.16	1550
14	Pecalungan	1031.14	3272
15	<b>Banyuputih</b>	<b>622.06</b>	<b>2138</b>
	Jumlah	22373.68	57385

Sumber: BPS Kabupaten Batang dan Dinas Pertanian Kaupaten Batang

**Tabel 4.** Sampel Penelitian Petani di Kecamatan Bandar dan Banyuputih

No	Kecamatan	Populasi	Perhitungan	Sampel
1	Bandar	5047	$(5047/7185) \times 99$	70
2	Banyuputih	2138	$(2138/7185) \times 99$	29
Jumlah		7185		99

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Untuk mendeskripsikan seberapa tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kabupaten Batang dengan menggunakan indikator enam tepat subsidi pupuk, yaitu tepat harga, jumlah, tempat, waktu, jenis dan mutu.

Pengukuran indikator tepat harga dilakukan dengan cara membandingkan harga ketetapan pemerintah (HET) dengan harga aktual yang diperoleh petani. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata harga pupuk di tingkat petani dengan yang disarankan pemerintah, digunakan rumus (Marisa, 2011):

$$\Delta P = P_r - P_p$$

Keterangan :

$\Delta P$  = Perbedaan harga (Rp)

$P_r$  = Harga yang diterima responden (Rp)

$P_p$  = Harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah (Rp)

Setelah diketahui selisih antara harga aktual dengan HET. Setelah itu dilakukan perbandingan antara responden yang memperoleh harga aktual sama dengan HET dengan responden yang memperoleh harga aktual tidak sama dengan HET. Persentase ketepatan harga dihitung dengan rumus (Arisandi dkk, 2016):

$$\text{Ketepatan harga} = \frac{N_h}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

$N_h$  = Jumlah responden yang memperoleh pupuk sesuai dengan HET

$N$  = Jumlah seluruh responden

Pengukuran indikator tepat jumlah dilakukan dengan cara membandingkan antara

jumlah penggunaan pupuk anjuran dengan yang digunakan oleh petani. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah pupuk yang digunakan oleh petani dengan yang disarankan pemerintah, maka digunakan rumus (Marisa, 2011):

$$\Delta Q = Q_r - Q_p$$

Keterangan :

$\Delta Q$  = Perbedaan jumlah (Kg/ha)

$Q_r$  = Jumlah pupuk yang dipergunakan oleh responden (Kg/ha)

$Q_p$  = Jumlah pupuk yang disarankan oleh pemerintah (Kg/ha)

Setelah didapat selisih antara jumlah aktual dengan jumlah sesuai anjuran. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara responden yang menggunakan pupuk sesuai dengan anjuran dengan responden yang menggunakan pupuk tidak sesuai anjuran dalam bentuk persen menggunakan rumus:

$$\text{Ketepatan jumlah} = \frac{N_j}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

$N_j$  = Jumlah responden yang menggunakan pupuk sesuai dosis anjuran (kg/ha)

$N$  = Jumlah seluruh responden

Pengukuran indikator tepat tempat yaitu berdasarkan kios tempat responden membeli pupuk yaitu pada kios resmi yang sesuai dengan RDKK atau tidak. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara responden yang membeli pupuk di kios resmi sesuai RDKK atau tidak dalam bentuk persen dengan rumus:

$$\text{Ketepatan tempat} = \frac{N_t}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

$N_t$  = Jumlah responden yang mendapatkan pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi sesuai RDKK

$N$  = Jumlah seluruh responden

Pengukuran indikator tepat waktu berdasarkan pendapat responden tentang tersedia atau tidaknya pupuk ketika dibutuhkan oleh responden. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara responden yang berpendapat bahwa pupuk selalu ada setiap dibutuhkan dengan responden yang berpendapat bahwa masih ada kekurangan pupuk dalam bentuk persen dengan menggunakan rumus:

Ketepatan waktu =

Keterangan :

$N_w$  = Jumlah responden yang berpendapat pupuk tersedia pada saat dibutuhkan/tidak pernah terjadi kelangkaan

$N$  = Jumlah seluruh responden

Pengukuran indikator tepat jenis berdasarkan jenis pupuk subsidi yang diterima oleh responden apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah atau tidak. Kemudian dilakukan perbandingan antara responden yang berpendapat bahwa jenis pupuk yang disubsidi sudah sesuai dengan responden yang berpendapat bahwa jenis pupuk yang disubsidi tidak sesuai dalam bentuk persen menggunakan rumus:

Ketepatan jenis =

Keterangan :

$N_s$  = Jumlah responden yang berpendapat pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah yaitu ada lima jenis (Urea, NPK, SP-36, Za, Organik)

$N$  = Jumlah seluruh responden

Pengukuran indikator mutu berdasarkan pendapat responden mengenai kualitas mutu pupuk yang diterima. Indikator tepat mutu antara lain yaitu; label kemasan, berat, warna pupuk subsidi serta harga. Kemudian dilakukan perbandingan antara responden berpendapat bahwa kualitas mutu pupuk yang diterima sesuai atau tidak sesuai dalam bentuk

persen menggunakan rumus:

$$\text{Ketepatan mutu} = \frac{Nm}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

$N_m$  = Jumlah responden yang berpendapat pupuk subsidi memenuhi kriteria mutu dari label, harga, berat, dan warna.

$N$  = Jumlah seluruh responden

Ketika sudah didapatkan tingkat efektivitas dari masing-masing indikator, selanjutnya dilakukan pengklasifikasian tingkat efektivitas sesuai dengan klasifikasi kriteria nilai efektivitas. Klasifikasi kriteria nilai efektivitas menggunakan acuan Litbang Depdagri dalam Budiani (2009) sebagai berikut.

**Tabel 5.** Kriteria Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
0 – 39,99%	Sangat Tidak Efektif
40% - 59,99%	Tidak Efektif
60% - 79,99%	Cukup Efektif
80% - 100%	Sangat Efektif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pupuk merupakan komponen yang cukup penting peranannya dalam menunjang proses produksi padi. Dengan kebutuhan akan pupuk yang tinggi oleh petani tentu diperlukan program kebijakan pemerintah yang mendukung siklus usaha para petani. Salah satu kebijakan pemerintah yang penting adalah melalui kebijakan fiskal dengan pemberian subsidi pupuk. Dengan diberlakukannya kebijakan subsidi pupuk akan membantu terpenuhinya kebutuhan petani sehingga petani bisa mendapatkan pupuk dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan dalam mengatur subsidi pupuk yang saat ini diterapkan yaitu dengan menentukan harga eceran tertinggi (HET) yang diterima petani pada setiap jenis pupuk sehingga petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengeluaran akan pupuk yang tinggi sehingga dapat membantu

kebutuhan petani agar petani dapat menghasilkan produksi padi yang maksimal.

Penyaluran subsidi pupuk yang saat ini diterapkan adalah sistem terbuka dimana petani langsung dapat membeli pupuk ke pengecer resmi. Mulai tahun 2018 petani yang akan membeli pupuk harus menggunakan kartu tani pada setiap transaksinya namun hal tersebut masih belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga masih banyak transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan kartu tani. Penggunaan kartu tani sebenarnya ditujukan agar penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran karena setiap pembelian pupuk di pengecer resmi harus menggunakan kartu tersebut, namun pada kenyataannya implementasi dari penggunaan kartu tani masih belum berjalan. Pengawasan pupuk bersubsidi untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan pupuk subsidi adalah melalui prinsip enam tepat, yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat mutu. Hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kabupaten Batang dijelaskan sebagai berikut.

#### Indikator Tepat Harga

Tingkat efektivitas subsidi pupuk berdasarkan indikator tepat harga diukur dengan cara membandingkan harga pupuk yang diperoleh responden dengan harga pupuk sesuai HET. Pupuk yang mendapat subsidi dari pemerintah sebenarnya berjumlah lima jenis pupuk, yaitu pupuk Urea, NPK (phonska), SP-36, ZA, dan pupuk Organik (petroganik). Namun dari hasil penelitian responden hanya menggunakan tiga jenis pupuk untuk proses produksi padi mereka, ketiga jenis pupuk sub-

sidi yang digunakan merupakan pupuk yang dianggap sesuai dengan kebutuhan hara tanah yang dibutuhkan. Pupuk subsidi yang digunakan adalah pupuk Urea, NPK, dan SP-36.

Dari hasil penelitian pupuk Urea memiliki harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 1800/Kg. Namun pada kenyataannya harga pupuk Urea yang diperoleh responden rata-rata sebesar Rp 2000/Kg, sehingga terdapat selisih Rp 200/Kg antara harga yang diperoleh dengan harga yang seharusnya. Dengan kata lain responden telah membeli pupuk Urea dengan harga 11,11 persen lebih mahal HET untuk setiap kilogramnya. Untuk jenis NPK harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp 2300/Kg. Rata-rata harga pembelian responden untuk pupuk jenis NPK adalah sebesar Rp 2600/Kg yang berarti terdapat selisih sebesar Rp 300/Kg pupuk NPK. Sehingga rata-rata responden membeli pupuk jenis NPK dengan selisih harga 13,04 persen lebih mahal dari harga HET untuk setiap kilogramnya. Untuk jenis pupuk SP-36 harga eceran tertinggi untuk pupuk jenis SP-36 adalah sebesar Rp 2000/Kg. dari hasil penelitian rata-rata responden memperoleh pupuk tersebut dengan harga sebesar Rp 2250/Kg sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp 250/Kg dari harga aktual dengan harga eceran tertinggi. Berdasarkan data tersebut maka responden membeli pupuk jenis SP-36 lebih mahal 12,5 persen lebih mahal dari harga eceran tertinggi untuk tiap kilogram pupuk SP-36. Dari ketiga data tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketiga jenis pupuk tersebut mempunyai rata-rata harga pembelian yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Hal ini tentu sangat meru-

**Tabel 6.** Rata-rata harga pupuk subsidi yang digunakan responden

Uraian	Urea	NPK	Sp-36
Harga rata-rata pembelian responden	2000	2600	2300
Harga eceran tertinggi (HET)	1800	2300	2000
Selisih harga	200	300	250
Persentase perbedaan harga	11.11%	13.04%	12.5%

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian

gikan petani karena harga perolehan pupuk lebih mahal dari harga yang ditetapkan, mengingat untuk kebutuhan pupuk oleh petani sendiri mempunyai peran yang sangat penting dan kebutuhan cukup banyak untuk setiap musim tanam, sehingga dengan adanya selisih harga aktual pupuk subsidi yang diperoleh petani tentu juga akan berimbas terhadap membengkaknya biaya produksi petani untuk pupuk. Sehingga hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat efektivitas dari kebijakan subsidi pupuk.

Dari hasil penelitian pupuk subsidi yang digunakan responden untuk produksi padi hanya tiga jenis pupuk yaitu Urea, NPK, dan SP-36. Berdasar Tabel 6. Terlihat bahwa data rata-rata harga pupuk yang diperoleh responden sesuai jenis pupuk yang digunakan mempunyai harga pembelian yang lebih tinggi dari HET. Hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan pupuk subsidi. Kemudian untuk melihat tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasar indikator tepat harga dijabarkan pada tabel 7.

Analisis tingkat keefektifan kebijakan subsidi pupuk berdasar indikator ketepatan harga dilihat dari seberapa besar persentase responden yang menyatakan mendapat pupuk bersubsidi sesuai dengan harga HET yang telah ditentukan.

Tabel 7. menunjukkan pupuk yang digunakan responden hanya tiga jenis meliputi Urea, NPK, dan SP-36. Dari ketiga jenis pu-

puk bersubsidi yang digunakan oleh responden semuanya mempunyai kecenderungan yang sama dimana kebanyakan responden memperoleh harga yang lebih tinggi dari HET dengan persentase 90 persen dibanding dengan responden yang mendapat pupuk dengan harga sesuai HET yang hanya sebesar 10 persen, sehingga kebijakan subsidi pupuk dikategorikan sangat tidak efektif berdasarkan indikator tepat harga.

Kecenderungan harga yang lebih tinggi dikarenakan kebanyakan responden membeli pupuk tidak pada pengecer resmi, mereka lebih memilih membeli pupuk di kios yang terdekat dengan rumah mereka walaupun itu bukan kios pupuk resmi sehingga harga pupuk otomatis lebih mahal dari yang seharusnya. Perbedaan harga kebanyakan terjadi karena tempat pembelian pupuk responden belum sesuai dengan kios pengecer resmi yang ditentukan. Selain tempat pembelian pupuk hal lain yang mempengaruhi harga dikarenakan responden membeli pupuk secara eceran perkilo bukan membeli satu kantong langsung. Dengan pembelian secara eceran.

#### Indikator Tepat Jumlah

Tepat jumlah adalah jumlah penggunaan pupuk subsidi sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Pemberian jumlah pupuk yang tepat akan membuat pertumbuhan periodik tanaman secara optimal yang dapat dilihat dari tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun

**Tabel 7.** Persentase tingkat ketepatan harga pupuk subsidi responden

Jenis pupuk	Kesesuaian harga dengan HET	Jumlah	Persentase (%)
Urea	Tepat	10	10.20%
	Tidak tepat	88	89.80%
Npk	Tepat	7	7.07%
	Tidak tepat	92	92.93%
Sp-36	Tepat	4	30.76%
	Tidak tepat	9	69.24%
Total	Tepat	21	10%
	Tidak tepat	189	90%

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian

**Tabel 8.** Persentase Ketepatan Jumlah Penggunaan Pupuk Subsidi

Ketepatan Jumlah	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sesuai anjuran	13	13.13%
Tidak sesuai anjuran		86.87%
a. di bawah anjuran	69	
b. di atas anjuran	17	
TOTAL	99	100.00%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

**Tabel 9.** Persentase Tingkat Ketepatan Tempat Pupuk Subsidi Responden

Tempat Pembelian Pupuk	Jumlah Responden	Persentase %
Pengecer Resmi Sesuai RDKK	27	27.27%
Pengecer Tidak Sesuai RDKK		
Pengecer Resmi Diluar RDKK	31	72.73%
Pengecer Tidak Resmi	41	
Total	99	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

dan jumlah cabang (Suyantohadi, dkk 2009). Anjuran penggunaan pupuk subsidi menurut konsep pemupukan berimbang menggunakan pupuk majemuk adalah Urea 200kg/ha dan NPK Phonska 300kg/ha (PT Petrokimia Gresik). indikator tepat jumlah dijelaskan pada tabel 8.

Tabel 8. menunjukkan penggunaan pupuk responden responden. Dari hasil penelitian penggunaan pupuk responden belum sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Responden yang menggunakan pupuk dengan jumlah sesuai anjuran berjumlah 13 responden atau hanya 13,13 persen sehingga tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kabupaten Batang dikategorikan sangat tidak efektif. Ketidaksesuaian penggunaan pupuk oleh responden dilatarbelakangi banyak faktor, seperti budaya petani, tingkat kesuburan tanah ataupun karena tidak mengetahui perihal anjuran pemupukan yang tepat untuk tanaman padi sawah.

#### Indikator Tepat Tempat

Indikator tepat tempat yang dimaksud

adalah petani sebagai penerima subsidi pupuk dapat memperoleh pupuk subsidi pada kios pengecer resmi yang sudah ditentukan dalam RDKK setiap kelompok tani masing-masing. Setiap pengecer resmi seharusnya hanya melayani pembelian untuk petani yang hanya menjadi jatahnya sesuai dengan RDKK, sehingga penyaluran pupuk subsidi bisa tepat.

Dari tabel 9. menunjukkan seberapa besar besar tingkat ketepatan indikator tempat pembelian pupuk responden. Indikator tepat tempat diukur berdasarkan responden yang menyatakan tempat atau kios pembelian pupuk subsidi sudah sesuai RDKK. Responden yang membeli pupuk subsidi sesuai RDKK sejumlah 27 responden atau hanya 27,27 persen sehingga tingkat keefektifan kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kabupaten Batang berdasarkan indikator tepat tempat dikategorikan sangat tidak tepat. Responden lebih memilih membeli pupuk subsidi diluar RDKK karena masih terdapat kuis resmi yang jauh dari lokasi petani, sehingga responden lebih memilih membeli di kios non resmi namun lebih dekat dari lokasi mereka.

**Indikator Tepat Waktu**

Indikator tepat waktu yang dimaksud adalah apakah pupuk subsidi akan selalu tersedia atau tidak manakala dibutuhkan oleh petani untuk proses produksi. Dengan kata lain bahwa tidak terjadi kelangkaan atau keterlambatan dalam pendistribusian pupuk subsidi, sehingga stok pupuk selalu tersedia dan minimal harus ada satu minggu sebelum masa tanam.

Dari hasil penelitian pada tabel 10. responden menyatakan bahwa stok pupuk subsidi selalu ada saat dibutuhkan sehingga efektivitas kebijakan subsidi pupuk menurut indikator tepat waktu dapat dikategorikan sangat efektif.

**Indikator Tepat Jenis**

Indikator tepat jenis yang dimaksud adalah pupuk subsidi yang disalurkan ke petani sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian bahwa jenis pupuk yang disubsidi ada lima jenis, yaitu Urea, NPK, SP-36, Za, dan Organik.

Dari hasil penelitian pada Tabel 11. 99

responden menyatakan ketepatan jenis pupuk subsidi yang disalurkan ke petani sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah yaitu lima jenis pupuk sehingga efektivitas kebijakan subsidi pupuk menurut indikator tepat jenis dapat dikategorikan sangat efektif.

**Indikator Tepat Mutu**

Indikator tepat mutu merupakan indikator yang menyatakan kualitas pupuk subsidi yang diedarkan ke petani. Sesuai dengan ketentuan dan informasi dari dinas pertanian serta komisi pengawas pupuk dan pestisida KP3 bahwa indikator mutu dapat dilihat dari label kemasan, berat, warna, dan harga. Untuk dapat dinyatakan pupuk yang diedarkan sudah sesuai dengan ketepatan mutu semua aspek tersebut harus terpenuhi.

Dari Tabel 12. Dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan mutu pupuk subsidi yang diedarkan sudah sesuai sebanyak 7 responden atau hanya 7,07 persen sehingga efektivitas kebijakan pupuk subsidi berdasarkan indikator mutu dikategorikan sangat tidak efektif.

Berdasar Tabel 13. Hasil persentase keseluruhan enam indikator efektivitas kebijakan subsidi pupuk rata-rata sebesar 42,91 persen sehingga tingkat efektivitas kebijakan pupuk

**Tabel 10.** Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Pupuk Subsidi

Indikator Tepat Waktu	Jumlah Responden	Persentase
Pupuk Selalu Ada	99	100%
Pupuk Tidak Ada	0	0%
Jumlah	99	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

**Tabel 11.** Persentase Tingkat Ketepatan Jenis Pupuk Subsidi

Indikator tepat Jenis	Jumlah Responden	Persentase
Sesuai yang ditetapkan Pemerintah (5 Jenis Pupuk)	99	100%
Tidak sesuai yang ditetapkan Pemerintah	0	0
Jumlah	99	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

**Tabel 12.** Persentase Tingkat Ketepatan Mutu Pupuk Subsidi

Indikator Tepat Mutu	Jumlah Responden	Persentase %
Indikator mutu tidak sesuai		
Label sesuai	0	0
Label, berat sesuai	0	
Label, berat, warna sesuai	92	92,93%
Indikator Mutu Sesuai		
Label, harga, berat, warna sesuai	7	7,07%
Jumlah	99	100%

**Tabel 13.** Persentase Tingkat Keefektifan Kebijakan Subsidi Pupuk di Kabupaten Batang

Indikator Tingkat Keefektifan	Tepat %	Tidak Tepat %
Indikator tepat Harga	10%	90%
Indikator tepat Jumlah	13.13%	86.87%
Indikator tepat Tempat	27.27%	72.73%
Indikator tepat Waktu	100.00%	0.00%
Indikator tepat Jenis	100.00%	0.00%
Indikator tepat Mutu	7.07%	92.93%
Rata-rata	42.91%	57.09%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

di Kabupaten Batang berdasarkan enam indikator tepat dikategorikan tidak efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kabupaten Batang berdasarkan enam indikator keberhasilan secara keseluruhan dapat dikategorikan tidak efektif. Dari indikator tepat harga masih terdapat responden yang mendapat pupuk subsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditentukan pemerintah. Kecenderungan harga yang diterima responden yang lebih mahal karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait penjualan pupuk subsidi di tingkat pengecer sehingga pengecer dengan mudah mengambil keuntungan lebih dengan berbagai alasan. Salah Satu hal yang menjadi penyebab mudahnya para pengecer menjual di atas harga HET adalah karena kebanyakan responden tidak mengetahui tentang HET yang ditentu-

kan pemerintah untuk harga setiap jenis pupuk subsidi. Selain itu ketidaksesuaian harga pupuk subsidi dikarenakan karena masih banyak responden yang membeli tidak pada kios pengecer resmi yang sudah ditunjuk pemerintah.

Dari tepat jumlah masih ditemukan responden yang menggunakan pupuk tidak sesuai jumlah penggunaan pupuk sesuai anjuran, kebanyakan responden menggunakan pupuk dengan jumlah di bawah anjuran, namun ada pula responden yang menggunakan pupuk melebihi dari dosis yang dianjurkan. Hal tersebut karena didasari oleh budaya responden masing-masing sehingga penggunaan pupuk pada setiap lahan mereka belum sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Selain itu juga masih banyak responden yang belum mendapat pendampingan dari pihak terkait mengenai penggunaan dosis pupuk yang tepat.

Indikator tepat tempat, dan tepat mutu masih belum memenuhi kriteria sesuai. Dari

indikator tepat tempat masih banyak responden yang membeli pupuk diluar RDKK dan masih banyak responden yang membeli tidak pada pengecer resmi. Kemudian indikator tepat mutu belum dikatakan efektif karena kriteria mutu belum sepenuhnya terpenuhi karena masih adanya kriteria harga yang tidak sesuai.

Dari indikator tepat waktu dapat dikatakan efektif. Tepat waktu pupuk subsidi sudah sesuai karena pupuk bersubsidi selalu ada pada saat dibutuhkan responden dan tidak pernah terjadi kelangkaan pupuk.

Dari indikator tepat jenis sudah terpenuhi karena jenis pupuk subsidi yang diedarkan ke responden sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah yaitu ada lima jenis pupuk subsidi.

Dari indikator mutu pupuk subsidi belum dikatakan efektif karena pada kriteria tingkat pengukuran mutu yaitu pada harga masih ada perbedaan, namun untuk indikator mutu yang meliputi label, berat, dan warna pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada: Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, Drs. Heri Yanto MBA, Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Ahmad Nurkhin, S.Pd, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi, Khasan Setiaji, S.Pd, M.Pd., Dosen Pembimbing, serta Penguji 1 dan 2. Semoga Penelitian Ini Dapat Bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

Arisandi., N. W. W., I. M. Sudarma, dan I. K.Rantau. 2016. Efektivitas Distribusi Pupuk Organik dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Subak Sungsang, Desa Tibubiu, Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Agribisnis dan Agrow-

isata 5(1): 1-10.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. 2017. Kabupaten Batang dalam Angka 2017. Batang : BPS Kabupaten Batang.

Badan Pusat Statistik. 2017. Hasil Survei Ongkos Struktur Usaha Tanaman Padi 2017. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Darwis, V. Supriyati. 2013. Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 11 No. 1, Juni 2014 : 45-60

Hermawan, I. 2014. Analisis dampak kebijakan subsidi pupuk urea dan tsp terhadap produksi padi dan capaian swasembada pangan di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 5(1): 63 –78.

Kementerian Keuangan. 2017. Nota Keuangan dan APBN 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/> (Diakses pada 19 September 2018)

Marisa, Suhaila. 2011. Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi (Studi Kasus : Kabupaten Bogor). *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Nugrogo, dkk. 2018. Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Agrisocionomics 2(1) : 70-82, Mei 2018

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengandaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Permentan/Sr.310/3/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017.

Rochaeni, Siti. 2014. *Pembangunan Pertanian Indonesia*. Edisi 2. Graha ilmu. Yogyakarta.

Santoso, A. B. 2015. Pengaruh luas lahan dan pupuk bersubsidi terhadap produksi padi Nasional. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 20(3): 208-212.

Susila, Wayan R 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. *J Litbang Pertanian* 29 (2): 43-49.

Suyantohadi, A., H. Mochamad, dan H. P. Mauridhi. 2009. Identifikasi pertumbuhan tanaman kedelai dengan pengaruh pemberian

komposisi pupuk menggunakan metoda artificial neural network. Agritech 29(4): 219-227.